

Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Marselina Lian¹, Laendatu Paembonan², Calvin A. Parinding³, Santi Yunus⁴, Yunus Sading⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

E-mail: Lianmarselina123@gmail.com, lpaembonan111@gmail.com

Article History:

Received: 02 Januari 2025

Revised: 26 Januari 2025

Accepted: 30 Januari 2025

Keywords: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.

Abstract: Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang di pergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokan penduduk miskin atau tidak miskin. Sementara itu, pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja yang dilakukan pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk program-program social terutama di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang di gunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah menurun dari 14,45 persen pada tahun 2016 menjadi 12,41 pada tahun 2023. Pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan anggaran berkontribusi pada penurunan Tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh suatu negara, termasuk masyarakat di dalamnya. Kondisi kemiskinan menyebabkan individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan. Oleh karena itu, isu kemiskinan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena dampaknya yang meluas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, terdapat banyak wilaya yang penduduknya masih hidup dalam kondisi serba kekurangan. Hal ini menjadi ironi mengingat beberapa daerah di Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, seperti emas, minyak bumi, dan lahan yang subur. Secara teori, keberadaan sumber daya tersebut seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Namun, kenyataannya kekayaan sumber daya alam tidak selalu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat local. (Waldeman, Irfan et al., 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (2019), kemiskinan

didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok memiliki tingkat pengeluaran yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup secara layak. Sementara itu, menurut World Bank, kemiskinan tidak hanya terbatas pada rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain. Aspek-aspek tersebut meliputi tingkat pendidikan yang rendah seperti buta huruf, derajat kesehatan yang buruk, ketimpangan gender, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Perspektif ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan multidimensi yang membutuhkan pendekatan komprehensif dalam penanganannya.

Pada tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016-2023.

No	Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Sulawesi Tengah	14,45	14,14	14,01	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41	12,83
2	Banggai Kepulauan	16,18	15,92	15,65	14,84	14,04	13,72	13,44	12,90	13,79
3	Banggai	9,47	9,20	9,12	7,8	7,39	7,83	7,33	6,94	7,46
4	Morowali	15,13	14,55	14,34	13,75	13,43	13,75	12,58	12,31	13,16
5	Poso	17,71	17,16	16,71	15,65	15,45	15,92	15,18	15,16	15,47
6	Donggala	18,59	18,17	18,03	18,4	17,39	16,73	16,3	16,25	17,01
7	Tolo-Toli	13,47	13,30	13,66	13,09	12,85	13,51	12,74	12,85	13,01
8	Buol	16,68	16,65	16,08	15,19	13,93	14,06	12,85	13,36	13,88
9	Parigi Moutong	17,80	17,55	17,41	16,64	15,85	15,28	14,63	14,91	15,46
10	Tojo Una-una	18,56	18,15	18,27	17,16	16,39	16,60	16,12	16,74	16,60
11	Sigi	12,76	12,66	12,60	12,91	12,45	13,05	12,3	12,83	12,66
12	Banggai Laut	16,60	16,17	16,32	15,34	14,60	14,17	13,17	14,15	14,29
13	Morowali Utara	16,07	15,73	15,53	15,08	14,10	13,90	12,97	12,85	13,78
14	Palu	7,06	6,74	6,58	6,83	6,80	7,17	6,63	6,56	6,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (BPS)

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 12,41 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,95 ribu jiwa di bandingkan dengan data pada September 2022. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kawasan perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,13 persen pada September 2022 menjadi 8,90 persen pada maret 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi di wilayah perkotaan meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan di provinsi ini masih relative tinggi.

Pengeluaran pemerintah adalah semua bentuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional, pembangunan, dan pelayanan bagi masyarakat.

Pengeluaran ini mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertahanan, dan kesejahteraan social, serta biaya administrasi dan operasional pemerintahan. Pengeluaran pemerintah juga merupakan suatu peran penting dalam perekonomian karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi (Mangkoesoebroto, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sangat berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan, pendapatan rumah tangga, pendidikan, asupan makanan yang bergizi, budaya setempat, serta keamanan tempat tinggal. Peningkatan jumlah populasi di suatu wilayah sering kali memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Secara umum, kemiskinan dikur tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan yang di miliki, tetapi juga dari akses terhadap bantuan atau fasilitas penunjang yang yang tersedia. (Pinontoan, 2020).

Secara ekonomi kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari arti luas. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standart baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line).

Dimensi dan indicator Kemiskinan

Untuk mengetahui lebih jelas dari dimensi kemiskinan tersebut maka masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut.

Secara ekonomi Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap barang atau sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar hidup yang layak. Sumber daya tersebut tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses terhadap infrastruktur dasar yang menunjang kesejahteraan hidup.

Dalam perspektif politik, kemiskinan juga dapat dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya publik. Struktur dan kebijakan politik yang tidak inklusif sering kali menjadi penghambat bagi individu atau kelompok miskin untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekuasaan dan hak politik dalam suatu masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah

Untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pemerintah merancang program yang bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan lapangan kerja bagi semua warga negara. Namun, pelaksanaan program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dalam pengelolaan uang negara, pemerintah dapat menerapkan kebijakan surplus anggaran ketika terjadi inflasi, dengan tujuan menekan kenaikan harga yang berlebihan. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi atau di perlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan deficit anggaran dengan meningkatkan pengeluaran

negara.(Abdul Aziz et, al (2010).

Pemerintah berperan dalam menyediakan berbagai barang dan jasa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memberikan layanan esensial, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, guna memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas yang mendukung kesehatan dan peningkatan pengetahuan. Dengan terciptanya masyarakat yang sehat dan berpendidikan, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan (Mongan (2019).

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Aulia et al., 2023).

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai.dalam hal ini, konstitusi telah menetapkan bahwa negara wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor pendidikan, sebagaimana di atur dalam UUD1945 pasal 31 Ayat 4. Ketentuan ini juga di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, yang menjelaskan bahwa alokasi dana pendidikan sebesar 20% tersebut digunakan untuk pembiayaan pendidikan, dengan pengecualian pembayaran gaji dan biaya pelatihan untuk pegawai negeri sipil.

Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kondisi kesehatan yangbaik, masyarakat tidak dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam teori *human capital*, sumber daya manusia dinilai lebih signifikan di dibandingkan teknologi dalam mendorong kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan akses layanan lesehatan yang merata, pemerintah kota membutuhkan sumber pendanaan yang memadai. Pendanaan tersebut umumnya berasal dari pajak yang di kumpulkan dari masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus dirancang agar sederhana, efisien, dan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak akan berdampak pada rendahnya pendapatan daerah, yang pada akhirnya menghambat alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Konsekuensinya, ketidakoptimalan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan berfungsi sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H Ayat (1) dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Menurut Todaro dan Smith (2003), alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan memiliki peranan yang sangat penting, karena berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya berpengaruh

terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan merupakan bagian yang dibutuhkan pada indek kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan bidang pendidikan maka, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang di teliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri 2017).

Teknik penelitian dalam penulisan ini, di lakukan dengan 2 cara yaitu:

1) Studi Lapangan

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang di butuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang sangat akurat karena bersumber langsung dari pemilik tempat penelitian.

2) Studi Pustaka

Penulis melakukan peneltia dengan mempelajari berbagai buku perpustakaan serta mencari referensi dari berbagai sumber internet. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memahami keadaan pengetahuan saat ini, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan memberikan konteks untuk studi yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini elastisitas di gunakan untuk mengetahui seberapa responsive pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Jika elastisitasnya lebih besar dari 1, maka pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan sangat responsive terhadap perubahan kemiskinan.

Berikut rumus pengeluaran kesehatan terhadap kemiskinan:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Perubahan pengeluaran kesehatan}}{\% \text{ Perubahan tingkat kemiskinan}}$$

Dengan:

- % Perubahan pengeluaran kesehatan adalah perubahan persentase pengeluaran sektor kesehatan selama periode tertentu.
- % Perubahan tingkat kemiskinan adalah perubahan persentase tingkat kemiskinan selama periode yang sama.

Berikut rumus pengeluaran Pendidikan terhadap kemiskinan:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Perubahan pengeluaran pendidikan}}{\% \text{ Perubahan tingkat kemiskinan}}$$

Dengan:

- % Perubahan pengeluaran pendidikan adalah perubahan persentase pengeluaran sektor kesehatan selama periode tertentu.
- % Perubahan tingkat kemiskinan adalah perubahan persentase tingkat kemiskinan selama periode yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Sulawesi Tengah merupakan masalah yang kompleks dan multifaset, namun dengan upaya yang tepat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, kondisi ini dapat ditingkatkan. Program-program yang fokus pada peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal akan sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan salah satu indikator utama keberhasilannya adalah pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan tersebut efektif, penting untuk memantau dan mengukur tingkat kemiskinan secara berkala, guna mengetahui apakah terjadi perubahan signifikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di wilayah Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di daerah ini cenderung berjalan lambat. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan berbagai peluang pekerjaan baru, kenyataannya, pengurangan jumlah penduduk miskin belum berlangsung optimal. Salah satu alat untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan, yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai apakah pendapatan seseorang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan barang penting lainnya. Apabila pendapatan seseorang berada di bawah garis tersebut, maka individu tersebut dikategorikan sebagai miskin.

Tabel 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2023

Kabupaten	Tahun								RATA-RATA
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sulawesi Tengah	14,45	14,14	14,01	13.48	12.92	13.00	12.33	12.41	12.83

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah

Pada bulan Maret 2016, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 14,45 persen, yang setara dengan sekitar 420 ribu jiwa. Selama beberapa tahun berikutnya, angka kemiskinan di provinsi ini menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mengalami penurunan ringan menjadi 12,92 persen. Namun, pada Maret 2022, persentase penduduk miskin kembali menurun sedikit menjadi 12,33 persen, dengan jumlah sekitar 388 ribu jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Meskipun demikian, pada tahun 2023, angka kemiskinan mengalami sedikit kenaikan, menjadi 12,41 persen, yang berarti sekitar 396 ribu jiwa tergolong miskin. Kenaikan tersebut mencerminkan penambahan sekitar 7 ribu orang miskin

dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah lebih signifikan di wilayah perdesaan di bandingkan perkotaan. Pada maret 2023 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09 persen, sementara tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 8,90 persen. Hal ini menunjukkan tantangan lebih besar di pedesaan.

Secara rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah 12,82 persen, artinya 12,82 persen dari penduduk Sulawesi Tengah adalah Penduduk miskin. Secara keseluruhan, fluktuasi tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan berbagai dinamika dan tantangan yang di hadapi oleh wilayah tersebut.

Perkembangan anggaran pemerintah sektor Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Perkembangan anggaran belanja bidang pendidikan Sulawesi Tengah terus-menerus mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini di sebabkan oleh penigkatan IPM di Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelas mengetahui anggaran belanja bidang pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2023

NO	TAHUN	BELANJA PENDIDIKAN	BIDANG PERTUMBUHAN
1	2016	161,450,000,240.00	
2	2017	750,604,261,802.00	3,65%
3	2018	749,664,513,499.00	-0,1%
4	2019	992,341,575,598.00	32%
5	2020	1,054,508,073,454.00	6%
6	2021	1,576,924,857,415.00	50%
7	2022	1,402,552,252,575.00	-11%
8	2023	1,166,230,918,524.00	-17%

Sumber : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Provinsi Sulawesi Tengah 2024*

Pengeluaran pemerintah sector pendidikan di Sulawesi tengah dari tahun 2016 hingga tahun 2023 sangat berperan penting dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Apabila institusi pendidikan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar, hal tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Khususnya di wilayah Sulawesi tengah, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menciptakan generasi mud yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi pada peninngkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan penurunan angka kemiskinan. Namun keberhasilan upaya tersebut sanat bergantung pada kemampuan institusi penddikan dalam menyediakan akses yang inklusif dan mendukung siswa dari latar belakang kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara optimal.

$$E = \left(\frac{P_{23}}{P_{16}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$E = \left(\frac{1.166.230.918.524}{161.450.000.240} \right)^{\frac{1}{7}} - 1$$

- Rasio : $\frac{P_{23}}{P_{16}} = \frac{1.166.230.918.524}{161.450.000.240} \approx 7,22$
- Pangkat $\frac{1}{7}$ (akar pangkat 7 dari 7,22)

$$7,22^{\frac{1}{7}} \approx 1,317$$

$$E = 1,317 - 1 = 0,317$$

Jadi, hasil elastisitas dari pengeluaran pendidikan yaitu 0,31%.

Nilai E=0,31% menunjukkan bahwa:

- Nilai 0,31 atau 31% menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan di Sulawesi Tengah rata-rata tumbuh sebesar 31% per tahun selama periode 2016–2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengalokasian anggaran sektor pendidikan.
- Elastisitas positif 0,31 persen berarti peningkatan pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel terkait dengan tingkat penurunan kemiskinan, tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar jika elastisitas kurang dari satu.

Peningkatan pengeluaran pendidikan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2023 memiliki efek positif tetapi masih terbatas. maka dari itu, di perlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran ini dalam mengurangi kemiskinan, seperti peningkatan kualitas pendidikan.

Perkembangan anggaran pemerintah sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Perkembangan Anggaran sektor kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga terus-menerus mengalami perubahan setiap tahunnya. Pengembangan sektor kesehatan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan infrastruktur, program kesehatan masyarakat, dan respon terhadap bencana pandemi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang anggaran pemerintah di bidang kesehatan dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016-2023

NO	TAHUN	BELANJA KESEHATAN	BIDANG PERTUMBUHAN
1	2016	75,373,981,965.00	
2	2017	61,552,308,456.00	0.18%
3	2018	342,532,561,947.00	4.56%
4	2019	455,972,138,990.00	0.33%
5	2020	427,975,126,274.00	0.06%
6	2021	288,130,042,676.00	0.33%
7	2022	253,660,651,784.00	0.12%
8	2023	251,624,372,622.00	0.01%

Sumber : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD)Provinsi Sulawesi Tengah 2024*

Pengeluaran pemerintah sector kesehatan merupakan salah satu instrument penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Investasi di sector ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Di Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi kemiskinan masih menjadi tantangan. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata. Dalam hal ini elastisitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh:

Rumus Elastisitas:

$$E = \left(\frac{K_{23}}{K_{16}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$E = \left(\frac{251.624.372.622}{75.373.981.965} \right)^{\frac{1}{7}} - 1$$

- Rasio : $\frac{P_{23}}{P_{16}} = \frac{251.624.372.622}{75.373.981.965} \approx 3,34$
- Pangkat $\frac{1}{7} = 0.142857$.
- Pertumbuhan tahunan rata-rata
 $E = (3,34)^{0,142857} - 1$
 $(3,34)^{0,142857} \approx 1,17$
 $E = 1,17 - 1 = 0,17$

Jadi, hasil elastisitas dari pengeluaran kesehatan adalah 0,17 persen.

Nilai Elastisitas = 0,17% menunjukkan bahwa pengeluaran sektor kesehatan tumbuh rata-rata sebesar 17 persen per tahun selama periode tahun 2016 hingga 2023. Nilai elastisitas ini memberikan gambaran bahwa peningkatan pengeluaran sektor kesehatan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi, meskipun pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan masih terbatas. Jika pengaruhnya lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, maka peningkatan pengeluaran sektor kesehatan perlu melakukan pemerataan akses layanan kesehatan, perbaikan kualitas fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Tengah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks disebabkan oleh berbagai factor, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan strategis berupa alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih baik serta kesehatan yang terjamin. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, individu diharapkan memiliki peluang yang layak. Selain itu, akses kesehatan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga harapan hidup dapat meningkat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat secara bertahap mengurangi angka kemiskinan. Hal ini biasanya diukur menggunakan pendekatan elastisitas yang menunjukkan bahwa kenaikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Sebagai contoh, di provinsi Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 14,45 persen pada tahun 2016 menjadi 12,41 persen pada tahun 2023. Namun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Penelitian ini akan membantu memastikan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan elastisitas pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan.

- **Hitung persentase perubahan tingkat kemiskinan**

Tingkat kemiskinan 2016 (P16) = 14,45%

Tingkat kemiskinan 2023 (P23)= 12,41%

$$\% \text{ Perubahan kemiskinan} = \frac{P23 - P16}{P16} \times 100$$

$$\% \text{ Perubahan kemiskinan} = \frac{12,41 - 14,45}{12,41} \times 100 = -14,10\%$$

- **Hitung persentase perubahan pengeluaran pendidikan**

Pengeluaran tahun 2016 (P16)= 161.450.000.240

Pengeluaran tahun 2023 (P23)= 1.166.230.918.524

$$\% \text{ Perubahan kemiskinan} = \frac{P23 - P16}{P16} \times 100$$

$$\% \text{ Perubahan pengeluaran} = \frac{1.166.230.918.524 - 161.450.000.240}{161.450.000.240} \times 100 \approx 622,7\%$$

- **Hitung persentase perubahan pengeluaran kesehatan**

Pengeluaran tahun 2016 (K16)= 75.373.981.965

Pengeluaran tahun 2023 (K23)= 251.624.372.622

$$\% \text{ Perubahan pengeluaran} = \frac{K23 - K16}{K16} \times 100$$

$$\% \text{ Perubahan pengeluaran} = \frac{251.624.372.622 - 75.373.981.965}{75.373.981.965} \times 100 \approx 233,8\%$$

Maka, hasil elastisitas dari pengeluaran pendidikan dan kesehatan, yaitu:

$$E_{\text{Pendidikan}} = \frac{-14,10\%}{622,7\%} \approx -0,023$$

$$E_{\text{Kesehatan}} = \frac{-14,10\%}{233,8\%} \approx -0,060$$

Hasil analisis menunjukkkan bahwa elastisitas pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan memiliki nilai yang relative rendah, yaitu sebesar 0,023. Nilai elastisitas ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor pendidikan hanya memberikan dampak yang sangat terbatas terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, elastisitas untuk pengeluaran sektor kesehatan tercatat lebih tinggi, sebesar 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor kesehatan berkontribusi lebih signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di bandingkan sektor pendidikan. Namun demikian meskipun kontribusi sektor kesehatan lebih besar, pengaruh tersebut belum mencapai tingkat yang optimal dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara konprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah lebih signifikan di wilayah perdesaan di bandingkan perkotaan. Pada maret 2023 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09 persen, sementara tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 8,90 persen. Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah menurun dari 14,45 persen pada tahun 2016 menjadi 12,41 pada tahun 2023. Penurunan kemiskinan ini dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran pemerintah di kedua sector tersebut dengan karakteristik yang berbeda. Berdasarkan pembahasan dan analisis elastisitas pengeluaran pemerintah di sector

pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan, maka di peroleh kesimpulan yaitu pada sector pendidikan mengalami peningkatan signifikan sebesar 622,7 persen selama periode 2016 hingga 2023, dari Rp 161,45 miliar menjadi Rp 1,16 triliun, sedangkan pengeluaran di sector kesehatan juga mengalami peningkatan sebesar 233,8 persen dari Rp 75,37 miliar menjadi Rp 251,62 miliar. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan anggaran berkontribusi pada penurunan kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz (2010) Lathifah, I. (2021). Pengaruh IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Laju PDRB Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(4), 407–418.
- Aulia, G. R. N., Akung Daeng, & Siti Fatimah. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kota Mataram Tahun 2012-2021. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.548>
- Bahri 2017 Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Mangkoesoebroto. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. In *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Mongan (2019), Atika Damayanti, iah H. (2023). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. 12(3), 614–627.
- Pinontoan, M. (2020). Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. In *PT Nasya Expanding*.
- Putri Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13308>
- Todaro dan Smith 2018 Rahim, A., & Sutanty. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 276–284. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.513>
- Waldeman, Irfan, M., Samsir, A., Jamli, M., Syafri, M., & Astuty, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Ekonomidynamika Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6(2), 182–197.